RAHASIA

APBD – 1
Keuangan
Pemerintah Provinsi

REPUBLIK INDONESIA

SURVEI STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI (APBD 2017)

1. Daftar isian ini digunakan untuk mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Tahun Anggaran 2017.
   Data tersebut nantinya akan digunakan untuk penghitungan DAU.
   Setelah diisi, mohon daftar ini dapat dikirimkan ke kantor BPS setempat paling lambat akhir **Bulan Juni 2017**.

2. Pelaksanaan survei ini berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 11.

3. Kerahasiaan data yang diberikan dijamin oleh Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 21.

4. Setiap responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik (Undang-Undang No. 16 Tahun 1997, Tentang Statistik, Pasal 27).

5. Survei ini tidak memungut biaya apapun.

6. Terimakasih disampaikan atas partisipasi dan kerjasamanya.

BADAN PUSAT STATISTIK

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT		
1.	Provinsi	☐☐
2.	Alamat Lengkap Kantor Gubernur	
3.	Alamat Lengkap Biro Keuangan Kantor Gubernur	

BLOK II. RINGKASAN APBD 2017 (Ribu Rupiah)	
A. Pendapatan Daerah	**…….**
B. Belanja Daerah (1+2)	**…….**
1. Belanja Tak Langsung	…….
2. Belanja Langsung	…….
C. Belanja Menurut Fungsi	**…….**
D. Pembiayaan	**…….**
1. Penerimaan Pembiayaan	…….
2. Pengeluaran Pembiayaan	…….
3. Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan	…….

TATA TERTIB PENGISIAN KUESIONER

- Semua isian harus ditulis dengan jelas agar mudah dibaca. Penulisan kata-kata harus menggunakan huruf kapital (balok) serta tidak boleh disingkat, kecuali kata-kata yang terlalu panjang. Angka harus ditulis dengan angka biasa (bukan angka romawi).
- **Cara pengisian daftar :**
  - Isikan keterangan/jawaban pada tempat yang disediakan dan tulis kode yang sesuai pada kotak yang tersedia.
  - Lingkari salah satu kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawabannya ke dalam kotak yang tersedia.
  - Pindahkan isian ke kotak dengan mengikuti kaidah penuh tepi kanan *(right justified)*.
  - Jika kode yang dilingkari lebih dari satu, jumlahkan kode yang dilingkari dan tuliskan pada kotak yang tersedia.

Penjelasan lebih lanjut, hubungi :
Sub Direktorat Statistik Keuangan
Jl. Dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710
Telepon : (021) 381 0291 - 4 , 384 1195, 3842508 pes 6310 Fax : (021) 386 3814
e-mail : statkeu@bps.go.id; maskurdin@bps.go.id

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
A	**PENDAPATAN DAERAH (1 + 2 + 3)**	
1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	
1.1	**Pajak Daerah**	
1.1.1	Pajak Kendaraan Bermotor	
1.1.2	Pajak Kendaraan di Air	
1.1.3	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	
1.1.4	Bea Balik Nama Kendaraan di Air	
1.1.5	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	
1.1.6	Pajak Air Permukaan	
1.1.7	Pajak Rokok	
1.1.8	Lainnya……..	
1.2	**Retribusi Daerah**	
1.2.1	**Retribusi Jasa Umum**	
1.2.1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	
1.2.1.2	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	
1.2.1.3	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	
1.2.1.4	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	
1.2.1.5	Retribusi Pelayanan Pendidikan	
1.2.1.6	Lainnya……..	
1.2.2	**Retribusi Jasa Usaha**	
1.2.2.1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	
1.2.2.2	Retribusi Tempat Pelelangan	
1.2.2.3	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	
1.2.2.4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	
1.2.2.5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	
1.2.2.6	Retribusi Penyeberangan di Air	
1.2.2.7	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	
1.2.2.8	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	
1.2.2.9	Retribusi Tempat Khusus Parkir	
1.2.2.10	Lainnya……..	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
1.2.3	**Retribusi Perizinan Tertentu**	
1.2.3.1	Retribusi Izin Trayek	
1.2.3.2	Retribusi Izin Usaha Perikanan	
1.2.3.3	Lainnya……..	
1.3	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	
1.3.1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	
1.3.2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN	
1.3.3	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta	
1.3.4	Lainnya……..	
1.4	**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**	
1.4.1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	
1.4.2	Jasa Giro	
1.4.3	Pendapatan Bunga	
1.4.4	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	
1.4.5	Komisi, Potongan dan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah	
1.4.6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
1.4.7	Pendapatan Denda Pajak	
1.4.8	Pendapatan Denda Retribusi	
1.4.9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	
1.4.10	Pendapatan dari Pengembalian	
1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	
1.4.12	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	
1.4.13	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan	
1.4.14	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	
1.4.15	Pendapatan BLUD dan JKN	
1.4.16	Lainnya……..	
2	**DANA PERIMBANGAN**	
2.1	**Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak**	
2.1.1	**Bagi Hasil Pajak**	
2.1.1.1	Pajak Bumi dan Bangunan	
2.1.1.2	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	
2.1.1.3	Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21	
2.1.1.4	Bagi Hasil Cukai Tembakau	
2.1.1.5	Lainnya……..	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
2.1.2	**Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam**	
2.1.2.1	Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH)	
2.1.2.2	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	
2.1.2.3	Dana Reboisasi	
2.1.2.4	Iuaran Tetap *(Land-rent)*	
2.1.2.5	Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)	
2.1.2.6	Pungutan Pengusahaan Perikanan	
2.1.2.7	Pungutan Hasil Perikanan	
2.1.2.8	Pertambangan Minyak Bumi	
2.1.2.9	Pertambangan Gas Bumi	
2.1.2.10	Pertambangan Panas Bumi	
2.1.2.11	Lainnya……..	
2.2	**Dana Alokasi Umum (DAU)**	
2.3	**Dana Alokasi Khusus (DAK)**	
2.3.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	
2.3.2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	
3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	
3.1	**Pendapatan Hibah**	
3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah	
3.1.2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya	
3.1.3	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	
3.1.4	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	
3.1.5	Pendapatan Hibah dari Luar Negeri	
3.1.6	Lainnya……..	
3.2	**Dana Darurat**	
3.2.1	Penanggulangan Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam	
3.2.2	Lainnya……..	

BLOK III. ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pendapatan		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
3.3	**Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya**	
3.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	
3.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten	
3.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Kota	
3.3.4	Lainnya……..	
3.4	**Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus**	
3.4.1	Dana Penyesuaian	
3.4.2	Dana Otonomi Khusus	
3.5	**Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya**	
3.5.1	Bantuan Keuangan dari Provinsi	
3.5.2	Bantuan Keuangan dari Kabupaten	
3.5.3	Bantuan Keuangan dari Kota	
3.6	**Lainnya……..**	

Catatan :

Total Pendapatan Daerah=Pendapatan Asli Daerah+Dana Perimbangan+Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		**(2)**
B	**BELANJA DAERAH (1 + 2)**	
1	**BELANJA TIDAK LANGSUNG**	
1.1	**Belanja Pegawai**	
1.1.1	Gaji dan Tunjangan	
1.1.2	Tambahan Penghasilan PNS	
1.1.3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	
1.1.4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.5	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	
1.1.6	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	
1.1.7	Lainnya……..	
1.2	**Belanja Bunga**	
1.2.1	Bunga Utang Pinjaman	
1.2.2	Bunga Utang Obligasi	
1.2.3	Lainnya……..	
1.3	**Belanja Subsidi**	
1.3.1	Belanja Subsidi kepada Perusahaan/Lembaga	
1.3.2	Lainnya……..	
1.4	**Belanja Hibah**	
1.4.1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	
1.4.2	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
1.4.3	Belanja Hibah kepada Pemerintah Desa	
1.4.4	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN	
1.4.5	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	
1.4.6	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Anggota Masyarakat	
1.4.7	Belanja Hibah Dana BOS	
1.4.8	Lainnya……..	
1.5	**Belanja Bantuan Sosial**	
1.5.1	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	
1.5.2	Belanja Bantuan Kelompok Masyarakat	
1.5.3	Belanja Bantuan Sosial Anggota Masyarakat	
1.5.4	Lainnya……..	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
1.6	**Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	
1.6.1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Provinsi	
1.6.2	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.3	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.4	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Kabupaten/Kota	
1.6.5	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa	
1.6.6	Lainnya……..	
1.7	**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa**	
1.7.1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi	
1.7.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota	
1.7.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa	
1.7.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa Lainnya	
1.7.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	
1.7.6	Lainnya……..	
1.8	**Belanja Tidak Terduga**	
2	**BELANJA LANGSUNG**	
2.1	**Belanja Pegawai**	
2.1.1	Honorarium PNS	
2.1.2	Honorarium Non PNS	
2.1.3	Uang Lembur	
2.1.4	Honorarium Pengelola Dana BOS	
2.1.5	Belanja yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	
2.1.6	Belanja Pegawai BLUD	
2.1.7	Lainnya……..	
2.2	**Belanja Barang dan Jasa**	
2.2.1	Belanja Bahan Pakai Habis	
2.2.2	Belanja Bahan/Material	
2.2.3	Belanja Jasa Kantor	
2.2.4	Belanja Premi Asuransi	
2.2.5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	
2.2.6	Belanja Cetak dan Penggandaan	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
2.2.7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	
2.2.8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	
2.2.9	Belanja Sewa Alat Berat	
2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	
2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman	
2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	
2.2.13	Belanja Pakaian Kerja	
2.2.14	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	
2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas	
2.2.16	Belanja Perjalanan Pindah Tugas	
2.2.17	Belanja Pemulangan Pegawai	
2.2.18	Belanja Pemeliharaan	
2.2.19	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	
2.2.20	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	
2.2.21	Belanja Jasa Konsultasi	
2.2.22	Belanja Barang Dana BOS	
2.2.23	Belanja Barang yang akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.24	Belanja Barang yang akan Dijual Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	
2.2.25	Lainnya……..	
2.3	**Belanja Modal**	
2.3.1	Belanja Modal Pengadaan Tanah	
2.3.2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	
2.3.3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	
2.3.4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	
2.3.5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	
2.3.6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	
2.3.7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Udara	
2.3.8	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	
2.3.9	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan dan Pemeliharaan Pertanian Peternakan	
2.3.10	Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
2.3.11	Belanja Modal Pengadaan Komputer	
2.3.12	Belanja Modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	

BLOK IV. ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
2.3.13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	
2.3.14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	
2.3.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	
2.3.16	Belanja Modal Peralatan Pemancar	
2.3.17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran dan Kesehatan	
2.3.18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	
2.3.19	Belanja Modal Alat Peraga/Praktek Sekolah	
2.3.20	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	
2.3.21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	
2.3.22	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Irigasi dan Jaringan Air	
2.3.23	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	
2.3.24	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	
2.3.25	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon, dan Gas	
2.3.26	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan	
2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	
2.3.28	Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan, dan Olahraga	
2.3.29	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	
2.3.30	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	
2.3.31	Belanja Modal Pengadaan BLUD dan JKN	
2.3.32	Lainnya……..	

Catatan :
Total Belanja Daerah = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
C	**BELANJA MENURUT FUNGSI**	
1	**PELAYANAN UMUM**	
1.1	Perencanaan Pembangunan	
1.2	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, dan Administrasi Keuangan Daerah	
1.3	Komunikasi dan Informasi	
1.4	Kepegawaian	
1.5	Kearsipan	
1.6	Statistik	
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8	Ketahanan Pangan	
1.9	Lainnya……..	
2	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	
2.1	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	
2.2	Lainnya……..	
3	**EKONOMI**	
3.1	Perhubungan	
3.2	Ketenagakerjaan	
3.3	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3.4	Penanaman Modal	
3.5	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
3.6	Pertanian	
3.7	Kehutanan	
3.8	Energi dan Sumber Daya Mineral	
3.9	Kelautan dan Perikanan	
3.10	Perdagangan	
3.11	Industri	
3.12	Ketransmigrasian	
3.13	Lainnya……..	
4	**LINGKUNGAN HIDUP**	
4.1	Penataan Ruang	
4.2	Lingkungan Hidup	
4.3	Pertanahan	
4.4	Lainnya……..	

BLOK V. ANGGARAN BELANJA MENURUT FUNGSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Belanja		**Jumlah (Ribu Rp)**
(1)		**(2)**
5	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	
5.1	Pekerjaan Umum	
5.2	Perumahan	
5.3	Lainnya……..	
6	**KESEHATAN**	
6.1	Kesehatan	
6.2	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	
6.3	Lainnya……..	
7	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	
7.1	Pariwisata	
7.2	Kebudayaan	
7.3	Lainnya……..	
8	**PENDIDIKAN**	
8.1	Pendidikan	
8.2	Pemuda dan Olah Raga	
8.3	Perpustakaan	
8.4	Lainnya……..	
9	**PERLINDUNGAN SOSIAL**	
9.1	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
9.2	Sosial	
9.3	Kependudukan dan Catatan Sipil	
9.4	Lainnya……..	

Catatan :

Total Belanja Menurut Fungsi = Belanja Langsung + Belanja Tak Langsung

BLOK VI. ANGGARAN PEMBIAYAAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI TAHUN ANGGARAN 2017		
Jenis Pembiayaan		Jumlah (Ribu Rp)
(1)		(2)
D	**PEMBIAYAAN**	
1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	
1.2	Pencairan Dana Cadangan	
1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	
1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	
1.6	Penerimaan Piutang Daerah	
1.7	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	
1.8	Lainnya……..	
2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	
2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	
2.3	Pembayaran Pokok Utang	
2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
2.5	Lainnya……..	
E	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN**	

Catatan :

Pembiayaan = Penerimaan Pembiayaan - Pengeluaran Pembiayaan

Kontrol :

Pendapatan (A) - Belanja (B) + Pembiayaan (D) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (E)

BLOK VII. C A T A T A N

Apabila ada hal - hal yang memerlukan keterangan, bisa dituliskan pada blok ini.
Selain informasi dari responden, petugas juga bisa menambahkan catatan
untuk memperjelas masalah yang berkaitan dengan isian kuesioner.

BLOK VIII. PENGESAHAN

Daftar ini diisi dengan sebenarnya
Menurut keadaan yang sesungguhnya oleh :

Nama : ……..
N I P : ……..
Jabatan : ……..

Tanda Tangan : ……..

……..…, ……..2017
Mengetahui
Sekwilda / Kepala Biro Keuangan
Daerah Provinsi

……

NIP. : ……..

BLOK IX. KETERANGAN PETUGAS

U r a i a n	P e n c a t a t	P e m e r i k s a
1. N a m a		
2. N I P		
3. Tanggal Pencatatan / Pemeriksaan		
4. Tanda Tangan		

D A T A

MENCERDASKAN BANGSA

Badan Pusat Statistik
Jl. dr. Sutomo No. 6 - 8, Kotak Pos 1003, Jakarta - 10010
Telepon : 3841195, 3842508, 3810291 - 5
Telex : 45159, 45169, 45325, 45375, 45385
Fax : 3857046, E - mail : bpshq@bps.go.id
Homepage: http://www.bps.go.id